

Analisis Penerapan ISO 26000 Koperasi Simpan Pinjam Lamongan dan Mojokerto

Zainul Wasik^{1*}

Program Doktor Ilmu Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga,
Surabaya, Indonesia 1, zainul.wasik-2022@feb.unair.ac.id

*Corresponding author

Muhammad Rusli²

Magister Management Community Entrepreneurship, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia,
kakrusli@gmail.com

Abstract

Background – 7 core subjects of ISO 26000 in Savings and Loans Cooperatives. Because researchers want to know to what extent the ISO 26000 standard has been carried out and applied by savings and loan cooperatives and whether it has met the requirements of the ISO 26000 standard with 7 core subjects in Savings and Loans Cooperatives, and the reason for researching cooperatives in Lamongan and Mojokerto districts is because many cooperatives are threatened failed to according (Beritajatim, 2021).

Aim – this study aims to analyze the activities of Savings and Loans Cooperatives and to analyze the implementation of ISO 26000 regarding organizational governance, human rights, labor practices, the environment, fair operating practices, consumer issues, as well as community involvement and development carried out by Savings and Loans Cooperatives and to analyze the challenges faced by savings and loan cooperatives related to the implementation of ISO 26000, referring to the ISO 26000 standard and To analyze the strategies implemented by related cooperatives in facing the challenges of implementing ISO 26000 and implementation of ISO26000 with sustainable achievement of SDGs.

Design / methodology / approach – researchers chose to use qualitative research methods to determine how to find, collect, process and analyze the data from the research. This qualitative research can be used to understand social interactions, for example by means of interviews and in-depth observations so that clear patterns will be found. Based on the research findings, there is no clear SOP so that it can lead to errors in employees and can result in not optimal performance of savings and loan cooperatives.

Findings – Lack of supervision in social responsibility towards the implementation of policies and management of cooperative business so there are many obstacles in every cooperative business implementation that is run. Based on the results, there are managerial implications as follows. It is hoped that the savings and loan cooperatives can maintain several core subjects that have been carried out well even though they are not yet optimal, they must be carried out in accordance with the vision and mission, culture and values, core competencies, SOP, Jobdisc, KPI and standardization in all lines of HR, finance, Marketing, Operations and pay more attention to good governance so that good performance can be created.

Research implication – It is hoped that the savings and loan cooperatives can create a good governance system so that it can have an impact on the performance of cooperatives to achieve targets and achieve goals. It is hoped that the existence of KSPPS BMT Permata Jatim and the Ben Iman Cooperative will become a Social (Community) Enterprise that can provide social value for the community and to overcome social problems by turning them into solutions with business activities.

Limitations – describe your research limitation, the limit that hinder your research to gain more result or the area that you only wish to study.

Keyword : ISO, Organizational, Human, Practices, Environment, Development.



Abstrak

Latar Belakang - 7 subyek inti dari ISO 26000 di Koperasi simpan pinjam. Karena peneliti ingin mengetahui sejauh mana standar ISO 26000 telah dilakukan dan diterapkan oleh koperasi simpan pinjam dan apakah telah memenuhi syarat dari standart ISO 26000 dengan 7 subyek inti pada Koperasi Simpan Pinjam, dan alasan meneliti koperasi di Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Mojokerto karena banyak koperasi yang terancam tumbang menurut (beritajatim,2021).

Tujuan - penelitian ini bertujuan Untuk Menganalisa Aktivitas Koperasi Simpan Pinjam dan Untuk menganalisis pelaksanaan ISO 26000 tentang tata kelola organisasi, hak asasi manusia, praktik perburuhan, lingkungan, praktik operasi yang adil, masalah konsumen, serta keterlibatan komunitas dan Pengembangan yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Untuk Menganalisa Tantangan yang dihadapi oleh koperasi simpan pinjam terkait penerapan ISO 26000, mengacu pada standart ISO 26000 dan Untuk Menganalisa strategi yang diterapkan oleh koperasi terkait dalam menghadapi tantangan penerapan ISO26000 dan Untuk menganalisa Keterkaitan antara penerapan ISO 26000 dengan pencapaian SDGs yang berkelanjutan.

Desain / metodologi / pendekatan - peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah serta menganalisis data hasil penelitian tersebut. Penelitian kualitatif ini dapat digunakan untuk memahami interaksi sosial, misalnya dengan cara wawancara dan observasi mendalam sehingga akan ditemukan pola-pola yang jelas.

Temuan - Kurangnya pegawasan dalam tanggung jawab sosial terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan usaha koperasi sehingga banyak hambatan dalam setiap pelaksanaan usaha koperasi yang dijalankan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka terdapat implikasi manajerial sebagai berikut Diharapkan pihak koperasi simpan pinjam dapat mempertahankan beberapa subyek inti yang sudah dijalankan dengan baik meskipun belum optimal harus tetap dijalankan sesuai dengan membuat visi dan misi, budaya dan nilai, kompetensi inti, SOP, *Jobdisc*, KPI dan standarisasi di semua bagian lini SDM, keuangan, Marketing, Operasional dan lebih memperhatikan Tata kelola yang baik sehingga dapat tercipta kinerja yang baik.

Implikasi penelitian - Diharapkan pihak koperasi simpan pinjam dapat membuat system tata kelola yang baik sehingga bisa berdampak kepada kinerja koperasi untuk mencapai target dan tercapainya tujuan. Diharapkan keberadaan KSPPS BMT Permata Jatim dan Koperasi Ben Iman menjadi Sosial (Community) Enterprise yang bisa memberikan nilai social bagi masyarakat dan untuk mengatasi masalah social dengan mengubahnya menjadi solusi dengan kegiatan bisnis.

Batasan penelitian - Penelitian ini hanya membahas semua mata pelajaran dalam ISO 26000 tentang tata kelola organisasi, hak asasi manusia, praktik ketenagakerjaan, lingkungan, praktik operasi yang adil, masalah konsumen, serta keterlibatan dan pengembangan masyarakat di Koperasi Simpan Pinjam. Sejauh mana manajemen koperasi simpan pinjam menerapkan aspek ISO 26000 untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kata kunci : ISO, Organisasi, Manusia, Praktik, Lingkungan, Pengembangan

PENDAHULUAN

Dalam mendukung keberhasilan pembangunan, keluarga merupakan komponen penting dalam dalam menciptakan sumber daya yang berkualitas. Salah satu peran keluarga dalam

mendorong perekonomian adalah dengan membentuk kelompok-kelompok usaha untuk mendapatkan penghasilan sebagai tambahan pendapatan keluarga. Masalah yang sering dihadapi oleh usaha-usaha keluarga atau usaha kecil adalah tidak



adanya sumber modal serta ilmu dalam mengelola usahanya supaya dapat berkembang dan bisa memperluas pemasarannya. Untuk itu diperlukan adanya wadah untuk dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia yang dimiliki oleh usaha kecil tersebut. Salah satu wadah yang paling efektif dan efisien adalah dengan dibentuknya koperasi.

Koperasi merupakan wadah yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat (anggota) sehingga dana tersebut dapat membantu para usaha kecil untuk merintis usahanya atau bahkan mengembangkan usahanya menjadi lebih besar. Salah satu manfaat koperasi juga adalah mensejahterakan anggotanya, artinya kalau koperasinya berkembang maka keuntungan koperasi yang dibagikan kepada anggota juga semakin meningkat. Masyarakat desa perlu didorong untuk dapat mendirikan koperasi serta dapat berpartisipasi untuk menjadi anggota bagian dari koperasi. Karena hal ini berdampak positif bagi seluruh anggota jika dikelola dengan baik.

Menurut penelitian Nugroho (2021) bahwa “koperasi memiliki peran yang cukup efektif untuk mensejahterakan masyarakat kecil serta kesadaran untuk berbangga diri menjadi bagian dari anggota koperasi”. begitu juga menurut penelitian Samuel (2020) hasil penelitian ini bahwa “keberadaan koperasi ditengah masyarakat,

dan kantor desa dimana koperasi tersebut berdiri atau berdomisili. Koperasi yang notabene sebagai lembaga keuangan yang berasaskan kekeluarga, yang membantu anggota masyarakat yang bernaung dalam bentuk perkoperasian, yang mana dapat membantu untuk meningkatkan atau mengembangkan usaha yang dimiliki anggota yang sekaligus nasabah yang menjadi pendana utama.

Manfaat keberadaan koperasi secara makro dapat sangat mendukung keberadaan UKM secara meluas mayoritas UKM mengandalkan pendanaan dari Koperasi Simpan Pinjam Ben Imangar bisa menjalankan usaha dan berikut data yang disampaikan sebagaimana di bawah:

Tantangan besar yang dihadapi koperasi saat ini adalah mengelola dan memberikan pinjaman yang bisa menumbuhkan ekonomi yang ada dikalangan menengah ke bawah. Data tersebut sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustina (2019) Dari hasil penelitian ditemukan bahwa “pemberdayaan yang dilakukan oleh Koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dibidang pertanian, mereka mendapat bantuan modal untuk mengembangkan usaha, bahkan hasil dari keuntungan yang didapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mengembangkan pertanian mereka. Diharapkan dengan hasil

ini kondisi perekonomian masyarakat menjadi lebih baik". Menurut penelitian Tri (2022) Peran Koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (terutama anggotanya) semakin nyata dan diakui sebagai sistem ekonomi yang sangat sesuai dengan karakteristik Bangsa Indonesia. Berdasarkan hasil identifikasi kondisi KPRI Sebra, disusun beberapa alternatif strategi yang merupakan kombinasi terbaik dari kondisi internal dan lingkungan eksternal. Pengabdian menyarankan untuk segera menyusun suatu strategi dan rencana pengembangan koperasi serta implementasinya dan pengabdian menyampaikan kesiapan sediaan untuk mendampingi pada keseluruhan proses tersebut.

Koperasi harus menyiapkan agar bisa menjawab tantangan sangat besar pada saat ini dengan menyiapkan internal yang cukup kuat agar bisa terealisasi jawaban tantangan yang besar itu maka dari segi pengelolaan manajemen harus sesuai dengan standar ISO 26000 untuk meningkatkan keberlangsungan koperasi.

ISO 26000 menerjemahkan tanggung jawab sosial sebagai tanggung jawab suatu organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis, yang Konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Memperhatikan

kepentingan dari para stakeholder sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma internasional Terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi, dalam pengertian ini meliputi baik kegiatan, produk maupun jasa.

Berdasarkan konsep ISO 26000 : *Guidance Standard on Social Responsibility*, penerapan sosial responsibility hendaknya terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi yang mencakup 7 isu, yaitu *organizational governance, human right, labor practices, the environment, fair operating practices, consumer issues, serta community involvement and development*. Dengan demikian jika suatu perusahaan hanya memperhatikan isu tertentu saja, misalnya suatu perusahaan sangat peduli terhadap isu lingkungan, namun perusahaan tersebut masih mengiklankan penerimaan pegawai dengan menyebutkan secara khusus kebutuhan pegawai sesuai dengan gender tertentu, maka sesuai dengan konsep ISO 26000 perusahaan tersebut sesungguhnya belum melaksanakan tanggung jawab sosialnya secara utuh.

Program-program yang dijalankan dalam skema *Social Responsibility* diharapkan memberikan manfaat atau berdampak positif bagi para pemangku kepentingan, sehingga perlu dikelola dengan baik dan terstandarisasi. Panduan global ini pun telah diakomodasi menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI) dengan



nama SNI ISO 26000 pada tahun 2013, sehingga dapat dijadikan sebagai referensi bagi perusahaan-perusahaan nasional, khususnya yang telah *go public*. Terdapat 7 subyek inti di dalam ISO 26000 yang perlu dilakukan oleh perusahaan, yaitu *organizational governance, human right, labor practices, the environment, fair operating practices, consumer issues*, serta *community involvement and development*. Penelitian ini menjelaskan semua subyek inti tersebut dan menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi perusahaan.

Tujuh subyek inti ini berperan sangat penting dan signifikan terhadap kenyamanan kerja bagi karyawan maupun kemajuan koperasi, sehingga memerlukan komitmen yang tinggi dan dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh manajemen koperasi. Secara lebih spesifik, penelitian akan diarahkan untuk mencermati ada tidaknya kesenjangan (*gap analysis*) yang terjadi di antara implementasi kedua subyek inti oleh koperasi dengan yang digariskan di dalam ISO 26000.

Penelitian ini adalah modifikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Robert (2019). topik yang digunakan adalah sama, namun dengan obyek penelitian yang berbeda, yakni: Modifikasi yang dilakukan adalah lebih focus pada subyek dari ISO 26000 dengan membahas 7 subyek inti dari ISO 26000 pada PT. Bakrie Sumatra Plantations Tbk (BSP) dan penelitian ini

hanya membahas 7 subyek inti dari ISO 26000 pada koperasi simpan pinjam tentang *organizational governance, human right, labor practices, the environment, fair operating practices, consumer issues*, serta *community involvement and development* pada Koperasi Simpan Pinjam.

Alasan kenapa peneliti membahas 7 subyek inti dari ISO 26000 di Koperasi simpan pinjam. Karena peneliti ingin mengetahui sejauh mana standar ISO 26000 telah dilakukan dan diterapkan oleh koperasi simpan pinjam dan apakah telah memenuhi syarat dari standart ISO 26000 dengan 7 subyek inti pada Koperasi Simpan Pinjam, dan alasan meneliti koperasi di Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Mojokerto karena banyak koperasi yang terancam tumbang menurut (beritajatim, 2021), banyak koperasi yang kurang berkembang di Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Mojokerto sehingga peneliti bertujuan untuk memberikan kontribusi kepada koperasi tersebut untuk bisa berkembang dan berkelanjutan. Tantangan untuk penelitian ini harus bisa menerapkan dan mengimplemantsikan pada 7 subyek inti ISO 26000 tentang *organizational governance, human right, labor practices, the environment, fair operating practices, consumer issues*, serta *community involvement and development* pada koperasi simpan pinjam yang ada di Kabupaten

lamongan dan Kabupaten Mojokerto untuk bertujuan berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Sustainability berdasarkan peneliti terdahulu

Akar konsep keberlanjutan dapat ditelusuri jauh ke dalam sejarah. Peradaban Mesir, Mesopotamia, Yunani, dan Romawi kuno mengalami masalah lingkungan, dan penulis Yunani kuno merekomendasikan praktik yang saat ini disebut berkelanjutan Du Pisani (2006).

Ancaman kekurangan kayu, yang digunakan secara luas pada abad kedelapan belas, “mendorong cara berpikir baru yang mendukung penggunaan sumber daya alam secara bertanggung jawab demi kepentingan generasi sekarang dan mendatang” Du Pisani (2006:85). Pemikiran ini penting kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan, yang didefinisikan sebagai “pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri” (Brundtland et al., 1987).

Konsep Sustainable Development berdasarkan Brundtland Report dan Peneliti Terdahulu

Pembangunan berkelanjutan telah ditetapkan pada tahun 1987 oleh *Brundtland Commission* sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan

masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang (Brundland, 1987). Komisi *Brundtland*, atau *the World Commission on Environment and Development* (WCED), dinamai menurut nama ketuanya, Dr. Gro Harlem Brundtland, Perdana Menteri Norwegia. Laporan mereka mendefinisikan “pembangunan berkelanjutan” di tingkat global sebagai “pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri” (WCED 1987). Definisi ini mengandung dua konsep utama, yaitu: Konsep “kebutuhan”, khususnya kebutuhan esensial kaum miskin dunia yang harus diberikan prioritas utama. Ide “keterbatasan” pada kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan kebutuhan masa depan. (*World Commission on Environment and Development* 1987)

Konsep Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda untuk mencapai pembangunan berkelanjutan secara global pada tiga dimensi, yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk rencana aksi untuk manusia, bumi, kemakmuran, dan perdamaian dunia. Tujuan dan sasaran SDGs terintegrasi dan menyeluruh, bersifat global dan dapat



diterapkan secara universal, memperhitungkan realitas nasional yang berbeda-beda kapasitas dan tingkat pembangunannya, serta menghormati setiap kebijakan dan prioritas nasional setiap negara. Oleh karena itu, peran negara sangat penting dalam melakukan pendekatan dan menyusun strategi yang menyeluruh antara pembangunan ekonomi, inklusi sosial, dan keberlanjutan lingkungan dengan tetap mengedepankan karakteristik dan prioritas nasional (Badan Pusat Statistik, 2016: 3).

SDGs mencakup 17 tujuan dan 169 sasaran yang berlaku mulai tahun 2016 hingga 2030. SDGs meliputi masalah-masalah pembangunan yang menyeluruh dan menargetkan penyelesaian yang tuntas dari setiap tujuan dan sasaran yang ada. Hal ini menjadikannya bersifat universal, memberikan peran yang seimbang kepada setiap negara, baik negara maju, negara berkembang, maupun negara kurang berkembang untuk berkontribusi penuh. Upaya pencapaian tujuan dan sasaran SDGs harus memberikan manfaat bagi semua, no one left behind (Badan Pusat Statistik, 2016: 3).

Konsep Social Responsibility (SR) berdasarkan ISO 26000

Dalam organisasi Internasional ISO, telah disusun draft tentang *Corporate Social Responsibility*, yang disebut dengan ISO 26000, dengan cakupan sebagai berikut :

1) Tata Kelola Organisasi Merupakan suatu system dimana organisasi membuat dan mengimplementasikan keputusan sesuai dengan tujuannya. Terdiri dari :

- a) Proses dan struktur pengambilan keputusan Transparensi, etis, akuntabel, perspektif jangka panjang, memperhatikan dampak terhadap pemangku kepentingan, berhubungan dengan pemangku kepentingan.
- b) Pendelegasian kekuasaan Kesamaan tujuan, kejelasan mandat, desentralisasi untuk menghindari keputusan yang otoriter.

2) Hak Asasi Manusia, Merupakan hak dasar semua manusia untuk merasa bebas, damai, sehat dan bahagia. Terdiri dari hal-hal sebagai berikut :

- a) Nondiskriminasi dan perhatian pada kelompok rentan
- b) Menghindari kerumitan.
- c) Hak-hak sipil dan politik.
- d) Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.
- e) Hak-hak dasar pekerja.

3) Praktek Ketenagakerjaan, Semua kebijakan dan praktek yang berhubungan dengan pekerjaan dalam suatu organisasi. Meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a) Kesempatan kerja dan hubungan pekerjaan.
- b) Kondisi kerja dan jaminan sosial.
- c) Dialog dengan berbagai pihak.
- d) Kesehatan dan keamanan kerja.
- e) Pengembangan sumber daya manusia.

4) Lingkungan Setiap keputusan dan aktivitas dari organisasi mempunyai dampak terhadap lingkungan alam. Untuk itu perlu diatur dalam point-point sebagai berikut :

- a) Pencegahan polusi.
 - b) Penggunaan sumber daya yang berkelanjutan.
 - c) Mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
 - d) Perlindungan dan pemulihan lingkungan.
- 5) Praktek Operasi yang adil, Organisasi harus mempunyai peraturan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku secara umum. Peraturan itu mencakup antara lain:
- a) Anti korupsi.
 - b) Keterlibatan yang bertanggung jawab dalam politik.
 - c) Kompetisi yang adil.
 - d) Promosi tanggung jawab sosial dalam rantai pemasok *supply chain*
 - e) Penghargaan atas *property rights*.
- 6) *Consumer Issues*, Organisasi harus mempunyai tanggung jawab terhadap pelanggan. Pelanggan atau konsumen mempunyai hak-hak antara lain :
- a) Praktek pemasaran, informasi dan kontrak yang adil.
 - b) Penjagaan kesehatan dan keselamatan konsumen.
 - c) Konsumsi yang berkelanjutan.
 - d) Penjagaan data dan privasi konsumen.
 - e) Pendidikan dan penyadaran.

7) Pembangunan Sosial dan Ekonomi Masyarakat, Hubungan antara organisasi dan komunitas harus berdasarkan kepada keterlibatan komunitas untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan komunitas tersebut. Untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Keterlibatan di masyarakat.
- b) Penciptaan lapangan kerja.
- c) Pengembangan teknologi.
- d) Kekayaan dan pendapatan.
- e) Investasi yang bertanggung jawab.
- f) Pendidikan dan kebudayaan.
- g) Kesehatan.
- h) Peningkatan kapasitas

METODOLOGI PENELITIAN

Permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti merupakan suatu masalah yang bersifat sosial dan dinamis. Maka dari itu, peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah serta menganalisis data hasil penelitian tersebut. Penelitian kualitatif ini dapat digunakan untuk memahami interaksi sosial, misalnya dengan cara wawancara dan observasi mendalam sehingga akan ditemukan pola-pola yang jelas.

Menurut Sukmadinata (2013;94) metode penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap,

kepercayaan, persepsi pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Metode penelitian kualitatif juga sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Penelitian kualitatif dilakukan pada objek alamiah yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak begitu mempengaruhi dinamika objek tersebut.

Sesuai judul penelitian yang dipilih, maka lokasi penelitian ini dilakukan pada KSPPS Ben Iman yg berlokasi di Kabupaten Lamongan dan KSPPS BMT Permata Jatim yang berlokasi di Kabupaten Mojokerto. Melakukan Wawancara dengan Direktur Koperasi dan Manager Operasional dan Manager Keuangan di Koperasi Simpan Pinjam.

Seperti yang telah disebutkan bahwa pemilihan informan pertama merupakan hal yang sangat utama sehingga harus dilakukan secara cermat, karena penelitian ini mengkaji tentang 7 subjek ISO 26000 tentang *organizational governance, human right, labor practices, the environment, fair operating practices, consumer issues, serta community involvement and development* pada Koperasi Simpan Pinjam maka peneliti memutuskan 6 informan kunci dalam penelitian ini adalah selaku Direktur KSPPS Ben Iman Lamongan dan selaku Manajer Operasional Koperasi Ben Iman dan selaku

Manajer keuangan Koperasi Ben Iman, dan Direktur Utama KSPPS BMT Permata Jatim Mojokerto dan selaku Manajer Operasional KSPPS Permata Jatim dan selaku Manajer keuangan KSPPS Permata Jatim, karena dalam perusahaan ini seluruh tanggung jawab kegiatan pengambilan keputusan koperasi simpan pinjam

HASIL DAN PEMAHASAN

Analisa Hasil Temuan Indikator ISO 26000 tentang Tata Kelola

Tata kelola merupakan suatu proses yang dilakukan oleh suatu organisasi atau masyarakat untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Definisi lain dari tata kelola, yaitu penggunaan institusi - institusi, struktur-struktur otoritas dan bahkan kolaborasi untuk mengalokasikan sumber-sumber data dan mengkoordinasi atau mengendalikan aktivitas di masyarakat atau ekonomi (Jogiyanto. dkk, 2011).

Tata kelola dalam sebuah organisasi merupakan suatu struktur dan proses pengambilan keputusan di tingkat korporat untuk mengarahkan perilaku yang diinginkan dari insan dan memastikan keberhasilan dalam rangka penciptaan nilai bagi para stakeholder (Jogiyanto. dkk, 2011). Definisi lain tentang tata kelola teknologi informasi, yaitu bagian terintegrasi dari pengelolaan perusahaan yang mencakup kepemimpinan, struktur serta proses organisasi yang memastikan



bahwa teknologi informasi perusahaan dapat digunakan untuk mempertahankan dan memperluas strategi dan tujuan organisasi (Suhendro, 2009).

Tata kelola di Koperasi Simpan Pinjam A di Lamongan masih banyak kekurangan yang harus dibenahi oleh pihak manajemen karena SOP dan tata kelola belum terstandarisasi dengan jelas dan dalam melakukan kegiatan sehari-hari hanya mengikuti kebiasaan seperti dibuat dengan mudah. Maka dari itu tata kelola Koperasi Simpan Pinjam A di Lamongan belum memenuhi standar ISO 26000. Sementara itu di Koperasi Simpan Pinjam KSPPS Permata Jatim juga sama halnya dengan belum terstandarisasi tata kelola yang jelas dan melakukan kegiatan juga dilakukan seperti kebiasaannya.

Indicator ini untuk mengetahui bagaimana tata kelola yang telah dilakukan selama menjalankan kinerja sehari-hari di koperasi Simpan Pinjam Koperasi Ben Iman yang belum tertata dengan baik oleh manajemen koperasi dan juga sama halnya yang berada di Koperasi Simpan Pinjam KSPPS Permata Jatim.

Analisa Hasil Temuan Indikator ISO 26000 tentang Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak dasar manusia yang ada dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, selain itu HAM juga merupakan hak natural yang oleh

karena itu tidak dapat dicabut oleh manusia lain sesama makhluk hidup. HAM dipercayai memiliki nilai universal yang berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu. 1 Nilai-nilai HAM adalah kebebasan, kesetaraan, otonomi dan keamanan. Lebih dari itu, inti nilai HAM adalah martabat manusia.

Kesadaran manusia terhadap hak asasi berasal dari keinsyafannya terhadap harga diri dan harkat martabat kemanusiaannya. Sesungguhnya HAM itu sudah ada sejak manusia dikodratkan lahir di dunia ini, dengan demikian HAM bukan merupakan hal yang baru lagi.

Hak asasi Manusia yang berada di Koperasi Simpan Pinjam Koperasi Ben Iman telah diberikan sesuai dengan kemampuan manajemen Koperasi. Artinya bahwa koperasi telah memenuhi kewajibannya kepada pegawai atau karyawannya yang harus menerima hak-hak sebagai pekerja. Begitu juga dengan Hak-Hak Asasi Manusia yang berada di Koperasi Simpan Pinjam KSPPS Permata Jatim telah diberikan sesuai apa yang dituntutkan karyawan terhadap manajemen koperasi. Artinya bahwa koperasi simpan pinjam KSPPS Permata Jatim telah mengedepankan Hak-hak asasi Manusia yang sebagaimana mestinya di terima oleh pekerjanya.

Indikator ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan pemberian Hak-Hak asasi Manusia yang dilakukan oleh pihak koperasi kepada Karyawannya

sehingga tidak akan terjadi permasalahan di kemudian harinya. Artinya bahwa koperasi simpan pinjam memprioritaskan Hak Hak Asasi Manusia. Koperasi Simpan Pinjam telah memenuhi persyaratan subyek inti ISO 26000 tentang Hak Hak Asasi Manusia.

Analisa Hasil Temuan Indikator ISO 26000 tentang Praktik Perburuhan

Perburuhan sekarang ini disebut dengan istilah ketenagakerjaan sehingga hukum perburuhan sama dengan hukum ketenagakerjaan. Ada beberapa pengertian yang dikemukakan oleh ahli hukum ketenagakerjaan menurut (Imam Soepomo, 2016) memberi pengertian bahwa hukum perburuhan adalah himpunan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan suatu kejadian pada saat seseorang bekerja pada orang lain secara formal dengan menerima upah tertentu. Kata lain hukum perburuhan adalah seperangkat aturan dan norma yang tertulis ataupun tidak tertulis yang mengatur pola hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja atau buruh.

Undang undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan merumuskan pengertian istilah ketenagakerjaan yaitu segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum selama dan sesudah masa kerja. Menurut undang undang ini tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna

menghasilkan barang dan/atau jasa baik memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Praktik perburuhan yang ada di Koperasi Simpan Pinjam Koperasi Ben Iman melakukan perjanjian prakerja terlebih dahulu terhadap karyawannya agar tidak terjadi permasalahan. Artinya sebagai koperasi memberikan keamanan dan jaminan secara legal hukum kepada para karyawannya. Begitu juga dengan Koperasi Simpan Pinjam KSPPS Permata Jatim melakukan perjanjian yang berisi tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.

Indikator ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan praktik perburuhan yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam dan sudah dilakukan dengan paib mengikuti peraturan hukum yang berlaku dan juga memberikan keamanan hukum pada karyawannya sehingga kedua belah pihak merasa nyaman dalam melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya. Koperasi Simpan Pinjam Koperasi Ben Iman da Koperasi Simpan Pinjam KSPPS Permata Jatim telah memenuhi syarat Praktik Perburuhan sesuai dengan Subyek Inti ISO 26000 tentang Praktik Perburuhan.

Analisa Hasil Temuan Indikator ISO 26000 tentang Lingkungan

Teori lingkungan ini memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Manusia dan kepentingannya dianggap yang paling menentukan dalam tatanan ekosistem dan dalam kebijakan yang diambil dalam kaitan dengan alam, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lain baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Jadi, etika lingkungan merupakan kebijaksanaan moral manusia dalam bergaul dengan lingkungannya. etika lingkungan diperlukan agar setiap kegiatan yang menyangkut lingkungan dipertimbangkan secara cermat sehingga keseimbangan lingkungan tetap terjaga.

Perihal Lingkungan dalam program yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam Koperasi Ben Iman mengedepankan untuk mencegah polusi setiap kegiatan yang dilakukan oleh karyawan dan pegawainya. Begitu juga dengan Koperasi simpan Pinjam KSPPS Permata Jatim telah melakukan program program yang sekiranya membantu kebersihan lingkungan yang di sekitar koperasi untuk membantu masyarakat hidup sehat dengan kebersihan.

Indikator ini untuk mengetahui bagaimana peran aktif koperasi simpan pinjam dalam hal kepentingan lingkungan sekitar. Artinya bahwa koperasi simpan pinjam Koperasi Ben Iman dan Koperasi Simpan Pinjam KSPPS Permata Jatim juga memberikan prioritas kepada kepedulian terhadap lingkungan baik itu masalah kebersihan maupun pengurangan polusi di lingkungan sekitar. Dengan demikian maka Koperasi Simpan Pinjam telah melakukan dan kepedulian terhadap Lingkungan sesuai dengan syarat subyek Inti ISO 26000 tentang Lingkungan.

Analisa Hasil Temuan Indikator ISO 26000 tentang Praktik Operasi yang Adil

Elemen ini mencakup pelaksanaan aktivitas secara etik dan pengungkapan aktivitas perusahaan yang transparan, pelaksanaan aktivitas pemilihan pemasok yang etis dan sehat, penghormatan terhadap hak-hak intelektual dan kepentingan stakeholder, serta perlawanan terhadap korupsi.

Koperasi Simpan Pinjam Koperasi Ben Iman berkomitmen untuk senantiasa menjalankan praktik-praktik operasi yang adil. Praktik ini didasari bahwa sebagai entitas bisnis Koperasi simpan pinjam harus professional dalam menghasilkan produk dan jasanya, menjunjung tinggi integritas dalam melaksanakan bisnisnya, memiliki kesadaran untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat,



menghargai hak cipta dan sadar untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan Koperasi Simpan Pinjam KSPPS Permata Jatim berupaya menerapkan praktik operasi yang adil. Sebagai landasan dari praktik ini adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan internal, serta berbagai standar. Sebagai tindak lanjut dari komitmen, Koperasi mengembangkan berbagai kebijakan yang mendukung. Kebijakan ini tertera pada peraturan, code of conduct, maupun dokumen lainnya. Selain itu, koperasi kedepannya juga membangun *whistle blowing systems* untuk memudahkan pengaduan bila terdapat pelanggaran.

Koperasi menjamin bahwa setiap pihak yang berkepentingan mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Koperasi menerapkan kegiatan operasional dengan memperhatikan hak para pemangku kepentingan sehingga menciptakan hubungan yang harmonis dan mewujudkan keseimbangan atas kepentingan seluruh para pemangku kepentingan.

Indicator ini untuk mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan praktik operasi yang adil pada Koperasi simpan Pinjam Koperasi Ben Iman dan Koperasi Simpan Pinjam KSPPS Permata Jatim. Pada

pelaksanaan praktik operasi yang adil koperasi Simpan Pinjam Koperasi Ben Iman mengedepankan profesionalitas dan menjunjung tinggi integritas, artinya bahwa koperasi ini memperdulikan praktik operasi yang adil guna bertujuan untuk kebaikan koperasi simpan pinjam Koperasi Ben Iman. Sementara itu, pelaksanaan Praktik Operasi yang Adil pada Koperasi Simpan Pinjam KSPPS Permata Jatim juga mengikuti kebijakan dan peraturan yang berlaku sehingga memiliki komitmen. Artinya bahwa koperasi ini sangat berpegang teguh pada praktik operasi yang adil karena memiliki komitmen yang tinggi setiap karyawannya.

Analisa Hasil Temuan Indikator ISO 26000 tentang Isu-Isu Konsumen

Elemen ini mencakup penyediaan informasi yang akurat dan relevan tentang produk perusahaan kepada pelanggan, penyediaan produk yang aman dan bermanfaat bagi pelanggan.

Isu-Isu konsumen yang berada di Koperasi Simpan Pinjam Koperasi Ben Iman diselesaikan dengan baik oleh pihak manajemen koperasi dengan cara mengadakan pertemuan/ cangkrukan untuk mencari solusi yang terbaik berupa win win solution bagi kedua belah pihak. Sedangkan di Koperasi Simpan Pinjam KSPPS Permata Jatim dalam penanganan isu konsumen/ permasalahan konsumen belum bisa menyelesaikan secara optimal

dikarenakan beberapa faktor yang menjadi hambatan oleh pihak manajemen koperasi seperti tidak bisa di pertemukan/ dilakukan duduk bersama untuk mencari solusi selalu ada yang tidak datang sehingga menjadikan permasalahan sangat panjang.

Indikator ini untuk mengetahui bagaimana penyelesaian isu konsumen yang dilakukan oleh pihak koperasi simpan pinjam. Pada Koperasi Simpan pinjam Koperasi Ben Iman penyelesaian masalah konsumen dirasa sangat optimal dengan adanya program cangkrukan.

Artinya bahwa koperasi simpan pinjam Koperasi Ben Iman sangat focus dalam hal penyelesaian masalah sehingga tidak akan menghambat kinerja koperasi dan tidak memberikan citra buruk pada koperasi simpan pinjam Koperasi Ben Iman, dengan demikian maka telah melakukan sesuai syarat subyek inti 26000 tentang isu konsumen. Sedangkan yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam KSPPS Permata Jatim belum dapat melakukan dengan optimal karena terhambat pertemuan dalam menyelesaikan masalah. Maka dengan demikian koperasi simpan pinjam KSPPS Permata Jatim masih belum bisa memenuhi standart subyek inti 26000 tentang isu konsumen

Analisa Hasil Temuan Indikator ISO 26000 tentang Keterlibatan dan Pengembangan Komunitas

Elemen ini mencakup pengembangan masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, aktivitas sosial kemasyarakatan, dan melibatkan masyarakat didalam aktivitas operasional perusahaan. Pelibatan masyarakat dalam pembangunan merupakan pandangan alternatif dari pendekatan yang menekankan pada inisiatif pemerintah. Friedman menjelaskan bahwa pelibatan masyarakat dalam pembangunan merupakan alternatif dari pola pembangunan yang selama ini menekankan pendekatan yang bersifat top-down (Friedmann, 1998).

Seiring dengan perkembangan waktu, konsep partisipasi (*participation*) mulai berubah ke arah keterlibatan (*engagement*). Para penggiat pembangunan semakin sadar bahwa keterbatasan sumberdaya yang dapat disediakan untuk melaksanakan pembangunan dapat diatasi dengan metode membuka peluang yang luas kepada berbagai pemangku kepentingan untuk terlibat secara nyata dalam rangkaian proses pembangunan (Shaw & Crowther, 2017).

Keterlibatan dan pengembangan komunitas yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Koperasi Ben Iman memberikan program kepada masyarakat

untuk pembangunan fasum dan program guru ngaji di daerah sekitar. Sedangkan yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam KSPPS Permata Jatim memberikan program kepada masyarakat sekitar untuk pembangunan musholla dan program social lainnya seperti membantu UMKM bangkit dan memperluas jaringan usahanya sehingga dapat meningkatkan perekonomian sekitar.

Indikator ini untuk mengetahui bagaimana peran keterlibatan dan pengembangan komunitas yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Koperasi Ben Iman dan Koperasi Simpan Pinjam KSPPS Permata Jatim. Pada pelaksanaannya kedua koperasi sama-sama mementingkan dan memprioritaskan keterlibatan komunitas untuk kemajuan dan kemakmuran yang berada di daerah sekitar dengan cara memberikan program sosial yang dilakukan oleh koperasi sehingga dapat dimanfaatkan oleh komunitas. Artinya bahwa koperasi telah sesuai melakukan peran keterlibatan dan pengembangan komunitas sesuai dengan subyek inti ISO 26000.

Hasil temuan berkaitan dengan SDGs di Koperasi Simpan Pinjam

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencanangkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai agenda global kelanjutan *Millennium Development Goals* (MDGs). SDGs memiliki 18 pencapaian

tujuan, antara lain hidup tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kesehatan dan kesejahteraan yang baik, pendidikan yang berkualitas, dan kesetaraan gender. Salah satu strategi pemerintah Indonesia untuk mendukung SDGs adalah dengan memberdayakan koperasi dan lembaga keuangan mikro di daerah pedesaan atau daerah kabupaten yang mayoritas pendapatan kecil.

Satu bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap pengembangan usaha mikro dan KSPPS Ben Imandalah dengan memberikan hibah kepada koperasi perempuan. Koperasi perempuan adalah koperasi yang anggotanya dan pengurusnya adalah perempuan. Perempuan diharapkan berkontribusi untuk meningkatkan pendapatan keluarga dan mengatasi masalah ekonomi dengan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Trivendi et al. 2011). Hal itu diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Satu kegiatan koperasi di pedesaan adalah usaha simpan pinjam, terutama bagi wanita dari keluarga berpenghasilan rendah yang dikelola bersama dan dapat saling menguntungkan. Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 02/Per./M.KUKM/II/2017 tentang perubahan ketentuan sebelumnya tentang



simpan pinjam. Pengaturan tersebut sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945.

Keberadaan koperasi memberikan manfaat bagi perempuan guna memberikan kontribusi pada peningkatan keluarganya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa koperasi membantu anggotanya memenuhi kebutuhan sosial, meningkatkan kesejahteraan, dan meningkatkan bisnis wanita (Mujanah et al, 2019). Untuk itu dilakukan penelitian tentang dampak koperasi dalam mendukung pencapaian SDGs di pedesaan.

Keberadaan koperasi di pedesaan dan daerah kabupaten yang berpendapatan rendah adalah a) mendorong kegiatan ekonomi di pedesaan dan daerah tersebut, b) mendorong partisipasi pendidikan formal di kalangan keluarga berpenghasilan rendah, c) memperkuat modal sosial penduduk pedesaan. Semua ini dapat mendukung pencapaian SDGs. Meskipun demikian, beberapa anggota masyarakat desa masih berhubungan dengan rentenir di desa tersebut. Oleh karena itu, koperasi desa perlu dukungan dan dikembangkan lebih lanjut dari segi kualitas dan kuantitas agar SDGs dapat tercapai secara lebih komprehensif. Rekomendasi dari penelitian ini adalah agar pengurus koperasi terus membangun kepercayaan terhadap anggotanya dalam mengelola KSPPS Ben Imangar dapat berjalan dengan lancar. Keberadaan koperasi dapat meningkatkan

modal sosial di kalangan keluarga miskin pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan, pendidikan serta mendorong mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan pedesaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis deskriptif tentang penerapan ISO 26000 yang telah diajukan dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Keberadaan koperasi di pedesaan dan daerah kabupaten yang berpendapatan rendah adalah

- a) Mendorong kegiatan ekonomi di pedesaan dan daerah tersebut yang terdapat aktivitas program Koperasi yang sudah melakukan penerapan SDGs.
- b) Mendorong partisipasi pendidikan formal di kalangan keluarga berpenghasilan rendah.
- c) Memperkuat modal sosial penduduk pedesaan. Semua ini dapat mendukung pencapaian SDGs.
- d) Memperkuat modal sosial penduduk pedesaan. Semua ini dapat mendukung pencapaian SDGs no 1 tanpa kemiskinan dan no 8 pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi.

IMPLIKASI MANAJERIAL

Berdasarkan kesimpulan yang merupakan hasil penelitian yang dilakukan mengenai pembahasan 7 subyek inti ISO 26000 Pada

Koperasi Simpan Pinjam rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan pihak koperasi simpan pinjam dapat mempertahankan beberapa subyek inti yang sudah dijalankan dengan baik meskipun belum optimal harus tetap dijalankan sesuai dengan membuat visi dan misi, budaya dan nilai, kompetensi inti, SOP, Jobdisc, KPI dan standarisasi di semua bagian lini SDM, keuangan, Marketing, Operasional dan lebih memperhatikan Tata kelola yang baik sehingga dapat tercipta kinerja yang baik.
2. Diharapkan pihak koperasi simpan pinjam dapat membuat system tata kelola yang baik sehingga bisa berdampak kepada kinerja koperasi untuk mencapai target dan tercapainya tujuan.
3. Diharapkan keberadaan KSPPS BMT Permata Jatimisa menjadi Sosial (*Community*) *Entreprise* yang bisa memberikan nilai social bagi masyarakat dan untuk mengatasi masalah social dengan mengubahnya menjadi solusi dengan kegiatan bisnis.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Mariana. S (2019). Peranan Koperasi Gapoktan Terhadap Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Huta Nauli. *Journal of Management Science (JMAS)* (2019).
- Badan Pusat Statistik. (2016). Potret Awal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) di Indonesia. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Brundtland. (1987), *the World Commission on Environment and Development (WCED)*
- Friedman, D dan H., Michael. 1988. "The Contribution of Rational Choice Theory to Macrosociological Research. *Sociological Theory* 6:201-218.
- <https://beritajatim.com/ekbis/220-koperasi-di-lamongan-tumbang-umkm-nasibnya-ikut-terancam/>
- Imam. Soepomo (2016), Pengantar Hukum Perburuhan, Jakarta: Djambatan) Cet. 10
- J. D. Pisani. (2006), *Sustainable development – historical roots of the concept*.
- Jogiyanto H.M, Willy A., (2011). Sistem tatakelola teknologi informasi, Indonesia.
- Mujanah S, Brahmasari IA, Ratih IAB, & Candraningrat C (2019) The impact of collective ambition, organizational culture, and organizational commitment on organizational citizenship behavior and the women's cooperatives' performance in East Java Indonesia. *International Journal of Civil Engineering and Technology* 10 (8):30-44.



- Nugroho, Mafhud (2021). *The Effectiveness Of Distribution Of Subsidized Sharia Mortgage Of Bank Btn Syariah For Communities With Low Income: A Case Study In Kendal Regency*. Journal of Management and Islamic Finance Vol. 1 No. 1 (2021): Journal of Management and Islamic Finance
- Robert, akyuwen, 2019. Gap Analysis Implementasi Iso 26000 Pada Perusahaan Publik. Vol. 31 No. 2 (2019): Modus
- Samuel, Ginting, (2020). *Penataan Manajemen Operasional Koperasi Sebagai Mitra Usaha Kreatif Masyarakat*. Intelektiva : Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora Vol. 02 No. 03 (2020).
- Shaw, I. C. (2017) 'Polystyrene as Hazardous Household Waste', Household Hazardous Waste Management, (April). doi: 10.5772/65865.
- Suhendro, (2009). Pengaruh perceived usefulness dan perceived ease of use dalam penggunaan sistem informasi keuangan. Surakarta: UMS 2009.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. (2013), Metode Penelitian Pendidikan. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Tri. Ratnawati. (2022), *Pelatihan Strategi Pengembangan Koperasi Pada Kpri Unit Pembangkit Sektor Brantas Pt. Pembangkit Jawa Bali*. Journal Sustainable Development Vol. 2 No. 03 (2022).
- Trivendi JC, Priyan PK, & Venay B (2011) The role of dairy cooperatives in women empowerment. The IUP Journal of Agricultural Economics (1):41-51.